BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sesuai dengan firoh atau *nature* yang diciptakan Tuhan dalam dirinya, mempunyai kebutuhan-kebutuhan jasmani, diantaranya kebutuhan seksual, yang akan dapat dipenuhi dengan baik dan teratur dalam hidup berkeluarga. Kebutuhan seksual kalau dipenuhi di luar perkawinan akan menimbulkan akibat-akibat yang akhirnya akan membawa kepada hal-hal yang tidak baik dan merugikan manusia .²

Manusia juga diciptakan Tuhan dengan keinginan untuk mempunyai keturunan. Melalui keturunanlah kelanjutan wujud manusia akan dapat terjamin. Manusia tidak ingin mempunyai keturunan yang tidak baik. Keturunan baik dapat diciptakan melalui hidup keluarga yang baik.³

Pada dasarnya pernikahan merupakan suatu hal yang diperintahkan dan dianjurkan oleh syara'. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT Surat *An-Nūr* ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمْ
 اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya:” Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba

²Harun Nasution, 2000, *Islam Rasional*, cet 6, LSAF, Jakarta, h. 434 .

³*Ibid*

sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) dan lagi Maha Mengetahui

Pernikahan yang dinyatakan sebagai *sunnatullāh* ini merupakan kebutuhan setiap naluri manusia yang dalam istilah agama disebut *mithāqan ghalīzā* yaitu suatu perjanjian yang sangat kokoh dan luhur, yang ditandai dengan pelaksanaan *sighat* ijab dan qabul antara wali nikah dengan mempelai pria, dengan tujuan untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia, sejahtera dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵

Peristiwa pernikahan tersebut oleh masyarakat disebut sebagai peristiwa yang sangat penting dan religius, karena peristiwa nikah disamping erat kaitannya dengan pelaksanaan syariat agama, juga dari pernikahan inilah akan terbentuk suatu rumah tangga atau keluarga sehat, sejahtera dan bertaqwa, yang menjadi landasan terbentuknya masyarakat dan bangsa Indonesia yang religius sosialis.⁶

Pada hakekatnya perkawinan itu mempunyai tujuan yang sangat mulia, yaitu membentuk suatu rumah tangga atau keluarga yang kekal dan bahagia serta terjalinnya rasa kasih sayang antara suami istri sehingga terbentuk suatu

⁴Kementerian Agama RI, 2012, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, P.T. Sinergi Pustaka Indonesia, h. 494.

⁵Departemen Agama RI, 2008, *Pedoman Akad Nikah*, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Jakarta, h.1.

⁶Kementrian Agama RI, 2013, *Tuntunan Praktis Pelaksanaan Akad Nikah dan Rumah Tangga Bahagia*, Bidang Urusan Agama Islam Kanwil kementerian Agama Propinsi Jawa Timur, Surabaya, h.7.

keluarga yang *sakīnah, mawaddah, warahmah*.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat *Ar-Rūm* ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.⁷

Perkawinan di Indonesia, ada perkawinan yang tidak tercatat dan perkawinan tercatat. Perkawinan yang tercatat ada yang menyebut kawin resmi dan kawin kantor. Demikian pula, ada yang menyebut perkawinan tidak tercatat dengan sebutan kawin di bawah tangan , kawin sirri , kawin syar’I , kawin liar, kawin modin, dan kerap disebut kawin kyai.⁸

Secara eksplisit memang tidak satupun *nās* baik al-Quran maupun hadis yang menyatakan keharusan adanya pencatatan perkawinan. Akan tetapi dalam kondisi seperti sekarang ini, pencatatan perkawinan merupakan sebuah kemestian, karena banyak sekali *mudarat* yang akan ditimbulkan jika tidak

⁷Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, *op.cit.*, h.572.

⁸Mukhlisin Muzaric, 2002, *Kontroversi Perkawinan Wanita Hamil*, Pustaka Dinamika, Yogyakarta, h. 110.

dilakukan pencatatan. Sementara Islam menggariskan bahwa setiap *kemudaratan* itu sedapat mungkin harus dihindari.⁹

Sahnya perkawinan bagi orang Islam di Indonesia, menurut pasal 2 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, ditentukan berdasarkan pencatatan perkawinan sebagai unsur penentu. Hukum agama (Islam) dapat diberlakukan sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini yang berfungsi sebagai pelengkap, bukan penentu. UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 merumuskan sahnya perkawinan dalam Pasal 2 ayat (1), sebagai berikut :

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan di hadapan pencatat perkawinan, dicatatkan dalam daftar pencatat perkawinan oleh pegawai tersebut, dan dilangsungkan menurut ketentuan undang-undang ini dan/atau ketentuan hukum perkawinan pihak-pihak yang melakukan perkawinan , sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini.”¹⁰

Pada mulanya syari’at Islam baik dalam al-Qur’an atau al Hadits tidak mengatur secara konkrit tentang adanya pencatatan perkawinan. Ini berbeda dengan ayat muamalat yang dalam situasi tertentu diperintahkan untuk mencatatnya. Tuntutan perkembangan dengan berbagai pertimbangan kemaslahatan , hukum Islam di Indonesia mengaturnya .¹¹

Pencatatan nikah bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan, dan khususnya

⁹Neng Djubaidah, 2012, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 207

¹⁰ *Ibid*

¹¹Ahmad Rofiq, 2013 , *Hukum Islam di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Rajawali Pers, Jakarta, h.107

bagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan nikah yang dibuktikan oleh akta, apabila terjadi perselisihan di antara suami istri maka salah satu diantaranya dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing. Karena dengan akta tersebut, suami istri memiliki bukti autentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.¹²

Dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 1946 jo Undang-Undang nomor 32 tahun 1954 ditegaskan bahwa pegawai pencatatan nikah mempunyai kedudukan yang jelas yakni satu-satunya pejabat yang berwenang mencatat perkawinan yang dilangsungkan menurut hukum agama Islam dalam wilayahnya.¹³

Pencatatan perkawinan bagi penduduk yang beragama Islam, pasal 8 (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menentukan, bahwa kewajiban Instansi Pelaksana untuk nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam pada tingkat Kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Kecamatan.¹⁴

Dalam praktiknya, KUA Kecamatan telah mengurus berbagai macam urusan keagamaan, seperti pencatatan pernikahan, pencatatan rujuk, pembuat akta ikrar wakaf, zakat, kemasjidan, izin pendirian Taman Pendidikan al-Qur'an (TPQ), pembinaan manasik haji, pembinaan dan pengembangan keluarga sakinah (BP4) yang biasanya dalam setahun dilaksanakan dua kali

¹² *Ibid.*

¹³ Kementrian Agama RI, *Tuntunan Praktis Pelaksanaan Akad Nikah dan Rumah Tangga Bahagia*, *loc.cit.*

¹⁴ Neng Djubaidah, *Op.cit.*, h. 225.

dalam bentuk diklat BINCATIN (Pembinaan Calon Pengantin). Dari sekian tugas yang dilaksanakan KUA, peran yang paling menonjol adalah mengurus pencatatan pernikahan dan akta ikrar wakaf.

Dari beberapa tugas KUA di atas terdapat sebuah problematika KUA dalam melaksanakan tugasnya. Problem tersebut adalah tentang permasalahan biaya nikah. Sebelum adanya PP. No. 47 Tahun 2004 jo PP No. 48 Tahun 2014 tentang biaya nikah, pak Modin yang biasanya membantu pengurusan administrasi pernikahan warga desa mematok tarif mahal sehingga cenderung meresahkan masyarakat. Namun dengan adanya aturan ini biaya nikah menjadi pasti dan pak modin tidak bisa lagi leluasa mematok tarif mahal kepada warga yang hendak mengurus pernikahannya di KUA. Jika calon pengantin faham alur dan tata cara pencatatan nikah, maka lebih baik mengurus sendiri untuk mengantisipasi pemerasan uang oleh pak modin. Namun masalah lain datang dengan adanya aturan ini, karena sejak diterbitkannya dan dilaksanakan aturan ini per 10 Juli 2014, maka semua pernikahan yang telah dilaksanakan dengan biaya pendaftaran yang awalnya sebesar Rp. 30.000,- menjadi Rp. 600.000,- sebagaimana yang tertulis dalam aturan tersebut. Hal ini menimbulkan berbagai macam tanggapan miring dari pak mudin maupun para pengantin.

Perubahan peraturan sangat berdampak negatif bagi petugas KUA maupun masyarakat dan menimbulkan prasangka yang kurang baik terhadap pihak KUA. Karena mencuatnya biaya nikah yang semula hanya Rp 30.000,- menjadi Rp 600.000,- dan bagi yang menikah di tanggal 10 Juli ke atas wajib menambah Rp 570.000,- bagi yang sudah setor Rp 30.000,- sebelum 10 Juli

tapi muncul peraturan lagi bahwa mereka tidak menambah Rp 570.000,- melainkan Rp 600.000,- jadi total mereka membayar di KUA bagi yang sudah setor sebelum per 10 Juli Rp 630.000,- Dan yang menjadi kontroversi dikemanakankah uang Rp 30.000,- di setoran awal tersebut sehingga hangus dan tidak dihitung sebagai biaya pernikahan. Seharusnya untuk pemerintah sebelum menetapkan peraturan baru ada perencanaan bagaimana dan berapa uang untuk pendaftaran nikah dan jika Rp 30.000,- hangus harusnya jelas dialokasikan kemana dan untuk apa sehingga tidak menjadi tanda tanya dan muncul persepsi yang kurang baik terhadap pegawai KUA bagi masyarakat. Karena selain 3x kerja untuk mengganti laporan keuangan pegawai KUA juga dituduh memeras warga yang akan menikah dengan dimahalkannya tarif tersebut padahal semula itu bermula pada P3N (modin) yang menetapkan tarif Rp 500.000,- bagi yang mendaftar menikah lewat perangkat desa tersebut sehingga ketika ada peraturan baru turun menjadi semakin tinggi biaya untuk menikah. Sehingga timbul persepsi yang kurang baik terhadap pegawai KUA. Sebenarnya maksud dari pemerintah menetapkan peraturan dengan tiga opsi; nikah di KUA dikenakan biaya Rp 0,- Nikah di luar KUA dikenakan biaya Rp 600.000,- dan bagi warga yang tidak mampu dikenakan biaya Rp 0,- untuk di rumah dengan syarat melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Hal ini bertujuan untuk agar semua warga yang ingin menikah itu dilaksanakan di KUA karena sebelum turunnya Undang-Undang yang baru itu banyak sekali kasus hak-haknya pegawai KUA tertimbun pada pak modin.

Dengan adanya realitas yang ada di masyarakat semacam itu, dampak

yang timbul dari Peraturan Pemerintah yang baru ini banyak masyarakat yang tidak ingin mencatatkan perkawinannya di KUA dengan alasan banyak biaya yang perlu dikeluarkan dan banyak aturan-aturan pula yang mengikatnya. Merupakan hak asasi seorang pasangan pengantin untuk menentukan dimana dan kapan mereka akan melaksanakan akad nikah, karena sebagian banyak masyarakat mengartikan perkawinan adalah hal yang sakral bagi mereka.

Dari pemaparan masalah diatas, maka penulis merasa perlu melakukan tindakan lebih lanjut. Dengan melakukan beberapa penelitian yang tentunya diharapkan lebih membantu dalam memahami upaya apa saja yang dilakukan Kepala KUA maupun Petugas Pencatat Nikah dalam penetapan biaya nikah dan apa saja hambatan yang dihadapi oleh Kepala KUA dalam menetapkan biaya nikah. Untuk itu penulis tertarik meneliti permasalahan tersebut dengan judul “Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Penetapan Biaya Nikah Di KUA Nalumsari Kabupaten Jepara”.

B. Rumusan Masalah

Apabila kita membicarakan tentang perkawinan maka perhatian kita tidak akan lepas dari hukum Islam, sebab perkawinan adalah merupakan salah satu bagian dari hukum Islam. Di dalam hukum Islam perkawinan atau pernikahan adalah merupakan suatu lembaga hukum yang sangat penting dan sudah menjadi syariat dan kebiasaan dalam kehidupan beragama. Oleh karena itu perkawinan merupakan cabang yang terpenting dalam hukum Islam.

Mengingat akan arti pentingnya persoalan tentang perkawinan ini ,maka Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 telah mengatur masalah ini

sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 ayat (1) Nikah yang dilakukan menurut agama Islam selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya . Talak dan Rujuk yang dilakukan menurut agama Islam selanjutnya disebut Talak dan Rujuk diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah.

Oleh karena Undang-undang Nomor 2 Tahun 1946 dirasa belum lengkap maka pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan. Dalam Pasal 1 Undang-undang tersebut dinyatakan tentang dasar perkawinan yaitu :

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”¹⁵

Selanjutnya tentang pencatatan nikah KHI menjelaskan bahwa di dalam Pasal 2 ayat (2): “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”¹⁶

Bahwa dalam pencatatan nikah yang telah kita sebutkan sangatlah penting artinya bagi keabsahan, kepastian hukum dan kekuatan hukum nikah itu sendiri, seperti disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Selanjutnya berkenaan dengan biaya pencatatan nikah diatur oleh pemerintah dengan mengeluarkan PP no 48 tahun 2014 yang diberlakukan mulai 10 Juli 2014 yang dalam penerapannya perlu dikaji mengingat karena

¹⁵Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, ps 1.

¹⁶Departemen Agama RI, 2000, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama ,*Kompilasi Hukum Islam*, h. 15.

adanya perubahan biaya yang cukup tinggi bila dibandingkan dengan peraturan sebelumnya yaitu PP no 47 tahun 2004 dengan nominal biaya Rp 30,000,- menjadi Rp 600.000,-

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Penetapan Biaya Nikah Di KUA Nalumsari Kabupaten Jepara?
2. Kendala apa yang timbul dan solusinya dalam penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang penetapan biaya nikah KUA Nalumsari Kabupaten Jepara ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

8. Untuk memahami implementasi penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang penetapan biaya nikah di KUA Wilayah Jepara Selatan.
9. Untuk memahami kendala yang timbul dan solusinya dalam Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Penetapan Biaya Nikah Di KUA Nalumsari Kabupaten Jepara .

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat baik dari segi teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk mencari dan mengumpulkan datayang dianalisa dan diolah , ditelaah untuk kemudian disusun dalam bentuk tesis.
 - b. Menambah pengetahuan dan wawasan penulis di bidang pernikahan dan

memberikan sumbangan pemikiran untuk memantapkan teori tentang implementasi penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014 tentang penetapan biaya nikah.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah dan aparatnya diharapkan sebagai bahan masukan dalam penetapan biaya nikah .
- b. Sebagai referensi untuk melaksanakan penelitian sejenis secara mendalam

E. Kerangka konseptual.

Untuk mempermudah pemahaman terhadap istilah kunci dalam penelitian ini, maka penulis memberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Kajian Implementasi

Studi tentang implementasi diartikan sebagai menjalankan berbagai produk kebijakan dan perundang-undangan yang telah ditetapkan untuk dimanifestasikan dalam tindakan nyata. Studi implementasi terdiri dari aksi kebijakan berupa *input* dan proses, sedangkan evaluasi implementasi merupakan studi atas konsekuensi kebijakan berupa *output*.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014 .

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2004 tentang tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Departemen Agama. Dimana pada Peraturan Pemerintah tersebut berbunyi “Penerimaan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan per peristiwa nikah atau rujuk

dikenai tarif 600.000,00.”¹⁷

3. Biaya Nikah.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Biaya mengandung sebuah arti semua pengorbanan yang perlu dilakukan untuk suatu proses produksi, yang dinyatakan dengan satuan uang menurut harga pasar yang berlaku, baik yang akan terjadi maupun yang sudah terjadi.¹⁸ Sedangkan nikah adalah akad yang ditetapkan memperbolehkan bersenang senang antara laki-laki dan perempuan dan menghalalkan bersenang senangnya perempuan dengan laki-laki,¹⁹ yang dimaksud biaya nikah dalam tesis ini adalah biaya nikah yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah.

4. KUA Nalumsari

Menurut Buku Direktori Kantor urusan Agama Kecamatan Seluruh Indonesia, KUA Nalumsari berada di wilayah Kabuten Jepara dengan menempati nomor urut 2.584 secara nasional dan nomor 383 se Jawa Tengah dengan kode lokasi 14.01 12.²⁰

5. Kabupaten Jepara

Jepara sebagai salah satu kabupaten di Jawa Tengah terletak pada 5°43'20,67” sampai 6°47'25,83” Lintang Selatan dan 110°9'48,02” sampai

¹⁷Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Agama.

¹⁸Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2005 , *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, h.146

¹⁹Abdul Rahman Ghozali,2010, *Fiqh Munakahat*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta,h.8

²⁰Departemen Agama RI, 2008, *Buku Direktori Kantor Urusan Agama Kecamatan Seluruh Indonesia*, Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, h. 127

110°58` 37,40” Bujur Timur. Sebelah Barat dan Utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kudus dan Pati dan sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Demak. Jarak terdekat dari ibukota kabupaten adalah Kecamatan Tahunan yaitu 7 km dan jarak terjauh adalah Kecamatan Karimunjawa yaitu 90 km.²¹

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Pembahasan atas permasalahan pokok dalam penelitian ini menggunakan Pendekatan “Yuridis Sosiologis”. yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan, Meneliti efektivitas suatu Undang-Undang dan Penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel sebagai alat pengumpul datanya terdiri dari studi dokumen, pengamatan (observasi), dan wawancara (*interview*)²²

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian, yaitu diskriptif analitis untuk menggambarkan dan memahami bahasan-bahasan yang berkaitan dengan Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Penetapan Biaya Nikah Di KUA Nalumsari Kabupaten Jepara.

²¹ <http://www.jeparakab.go.id/statis-6-kondisigeografi.html> diakses pada 13 Desember 2015.

²² Amiruddin 2012 , Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta , h.12

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh).²³

Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah sebagai berikut:

a. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data yang telah diperoleh dengan cara mempelajari Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang penetapan biaya nikah.

b. Sumber Data

Data dalam penelitian ini berasal dari dua sumber, yakni:

- 1) Sumber data primer yang diperoleh dari sumber utama yakni wawancara Kepala KUA , tokoh masyarakat dan beberapa masyarakat yang melaksanakan akad nikah di wilayah Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara.
- 2) Sumber data sekunder yaitu data yang diambil dan diperoleh dari bahan pustaka dengan mencari data atau informasi berupa benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen peraturan-peraturan dan catatan harian lainnya.²⁴ Dalam hal ini berupa bahan

²³Lexy J. Moleong, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, h. 3.

²⁴Suharismi Arikunto, 1997, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, PT. Rineka

pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain:

- a) Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/748 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Biaya Nikah atau Rujuk di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- b) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.
- c) Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang RI tanggal 21 Nopember 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura.
- d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- e) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- f) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.

c. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan beberapa metode yaitu :

cipta, Jakarta, h. 115.

1. Wawancara (*Interview*)

Menurut Esterberg, wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik. Ia juga mengemukakan beberapa macam wawancara, yaitu wawancara terstruktur, semiterstruktur, dan tidak terstruktur.²⁵

Dalam wawancara ini peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur. Tujuannya adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya.²⁶ Dalam wawancara ini peneliti langsung melakukan tanya jawab dengan nara sumber yaitu Kepala KUA Kecamatan Nalumsari, tokoh masyarakat dan beberapa masyarakat.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa baik berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental.²⁷ Metode ini digunakan untuk menguatkan data yang telah didapatkan.

d. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan dan

²⁵Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, CV, Alfabeta, Bandung, h. 317.

²⁶ *Ibid.*, h. 320.

²⁷ *Ibid.*, h. 329.

berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian.²⁸

Menurut Bogdan dalam Sugiyono data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang.²⁹

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data deskriptif, yaitu suatu analisis yang bersifat mendeskripsikan makna data atau fenomena yang dapat ditangkap oleh peneliti, dengan menunjukkan bukti-buktinya.³⁰

Metode deskriptif analitis ini digunakan dengan pola pikir deduktif yaitu untuk mendeskripsikan atau menggambarkan secara jelas tentang penerapan biaya nikah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014.

G. Sistematika Penulisan

Untuk menghasilkan suatu tulisan yang teratur dan terarah, peneliti menguraikan penelitian ini dalam empat bab, diantaranya sebagai berikut:

Bab I : Berupa pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, , kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

²⁸*Ibid.*,h.317.

²⁹*Ibid.*h.,334.

³⁰Muhammad Ali, 1993, *Strategi Penelitian Pendidikan*, Angkasa, Bandung, h.161.

- Bab II : Berupa landasan teori untuk menjawab permasalahan yang ada pada penelitian ini. Dalam bab ini, membahas mengenai pengertian perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan KHI , pengertian pencatatan perkawinan, tahap-tahap pencatatan perkawinan, tujuan pencatatan perkawinan dan peranan penacatatan perkawinan, lembaga administrasi pencatatan perkawinan dan ketentuan biaya nikah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014. Hal ini merupakan studi literatur yang di dapat dari berbagai referensi.
- Bab III : Hasil Penelitian dan Pembahasan, di dalam bab ini berisi profil Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nalumsari, hasil-hasil penelitian dan analilisis yang diperoleh terhadap Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Penetapan Biaya Nikah Di KUA Nalumsari Kabupaten Jepara dan menguraikan kendala yang timbul serta solusinya .
- Bab IV : Penutup ,Bab ini berisi tentang Kesimpulan dan Saran-saran dari uraian diatas atau dari hasil-hasil penelitian yang mungkin diperlukan dalam penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014 tentang penetapan biaya nikah di KUA, dimasa mendatang.